



# KINERJA FISKAL Perekonomian Indonesia

Aryan Eka Prastya Nugraha

2023

# Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

## Kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

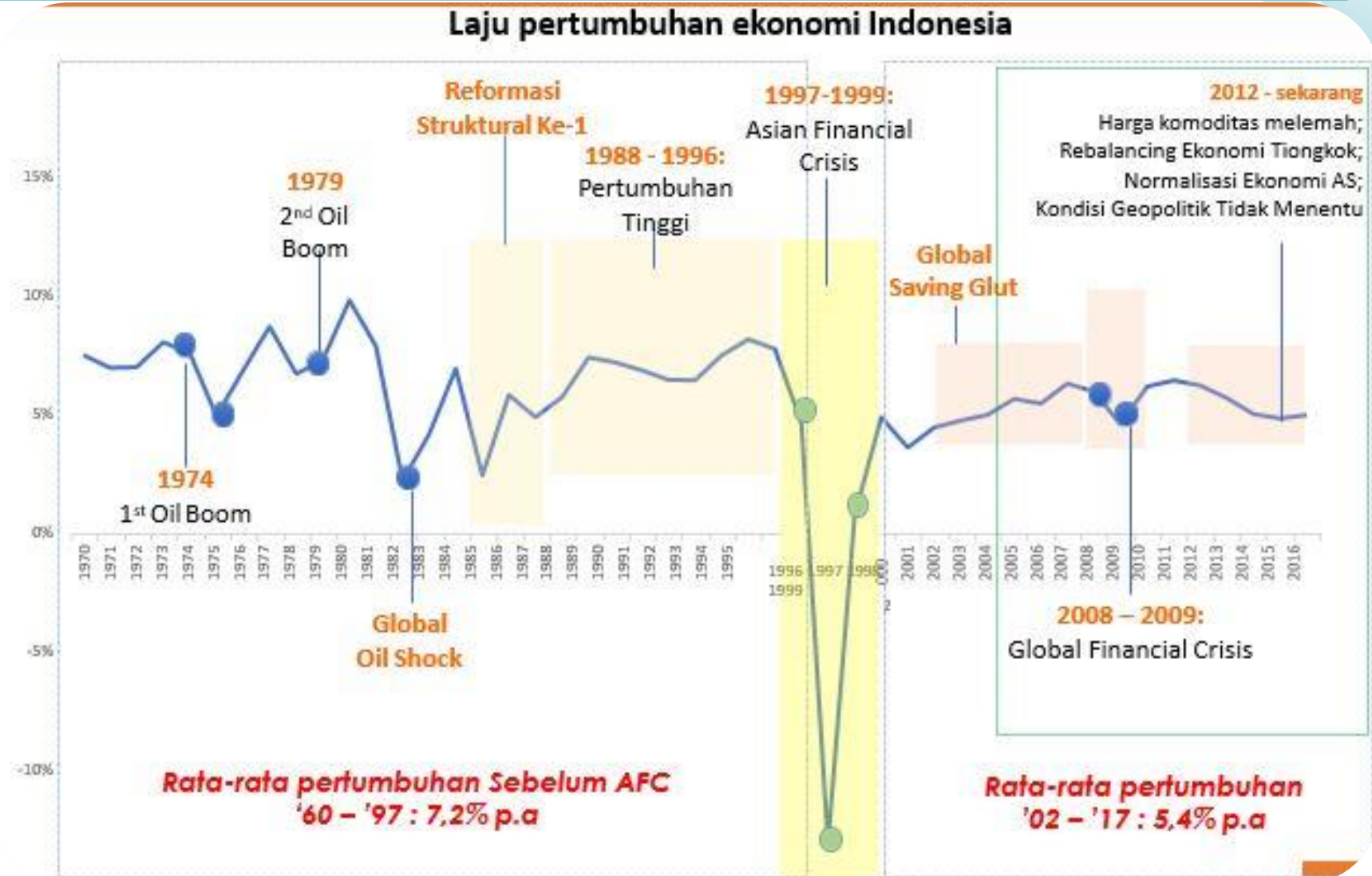
### • Minimal 6+ % p.a dibutuhkan untuk :

1.menciptakan lapangan kerja bagi 1,8 juta new entrants

- 1% growth = 250 ribu- 300 ribu jobs

2.Mengurangi kemiskinan di bawah 10 % dan mengurangi near poor di bawah 30% dari populasi.

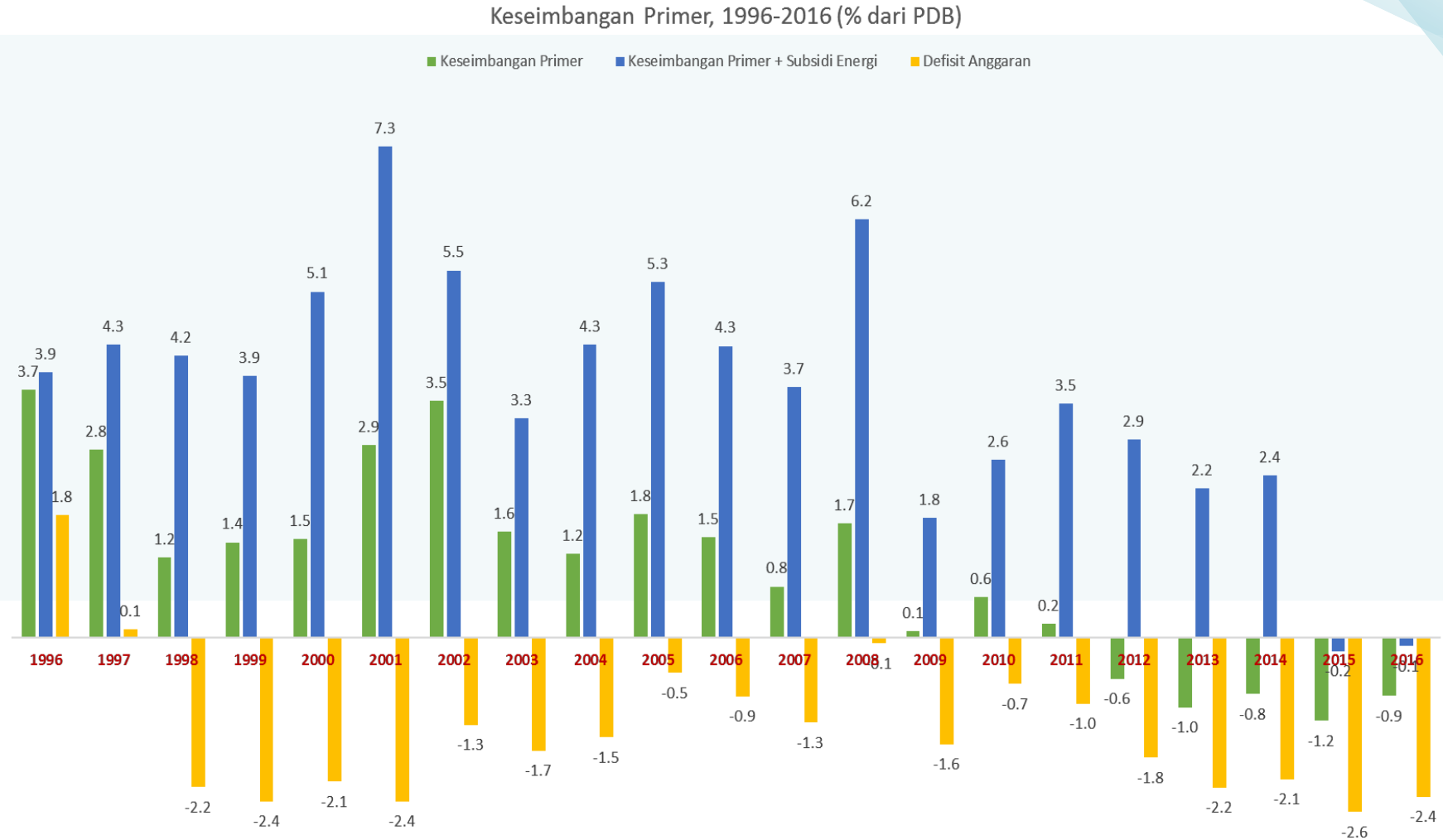
### • Minimal tumbuh 8% p.a untuk memanfaatkan secara optimal *demographic dividen* guna menghindari *Middle Income Trap*



# Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

## Untuk memperkuat ketahanan (resilience) ekonomi Indonesia

- **Kondisi ekonomi global dan nasional tidak selalu linier dan stabil.**
  - ✓ Indonesia perlu menjaga “fiscal space/buffer” untuk ketahanan ekonomi menghadapi shock (counter cyclical)
  - ✓ Pengalaman AFC 1998 dan GFC 2008, ketahanan ekonomi tergantung pada kesiapan dan ketahanan suatu negara menghadapi krisis.
  - ✓ *Fiscal Spaces* sudah banyak digunakan untuk mendukung perekonomian selama periode post AFC 1998 dan GFC 2008
- **Masih ada *contingent liability* yang akan bisa menjadi beban fiskal pemerintah.**
  - ✓ Sistem Jaminan social
  - ✓ Pemilikan pemerintah BUMN
  - ✓ UU Bank Indonesia
  - ✓ Jaminan terhadap Simpanan Masyarakat



# Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

**Kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi.**

- **Mekanisme pasar tidak cukup dan tidak mampu bekerja untuk mengurangi kemiskinan.**

✓ Tidak cukup insentif bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan kegiatan ekonomi bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.

- **Kegagalan mekanisme pasar cenderung menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi.**

Catatan: kepemilikan negara atas sumber daya alam dan bad public governance (seperti korupsi) sama potensinya seperti kegagalan mekanisme pasar terhadap inequality

**Angka Kemiskinan (%)**

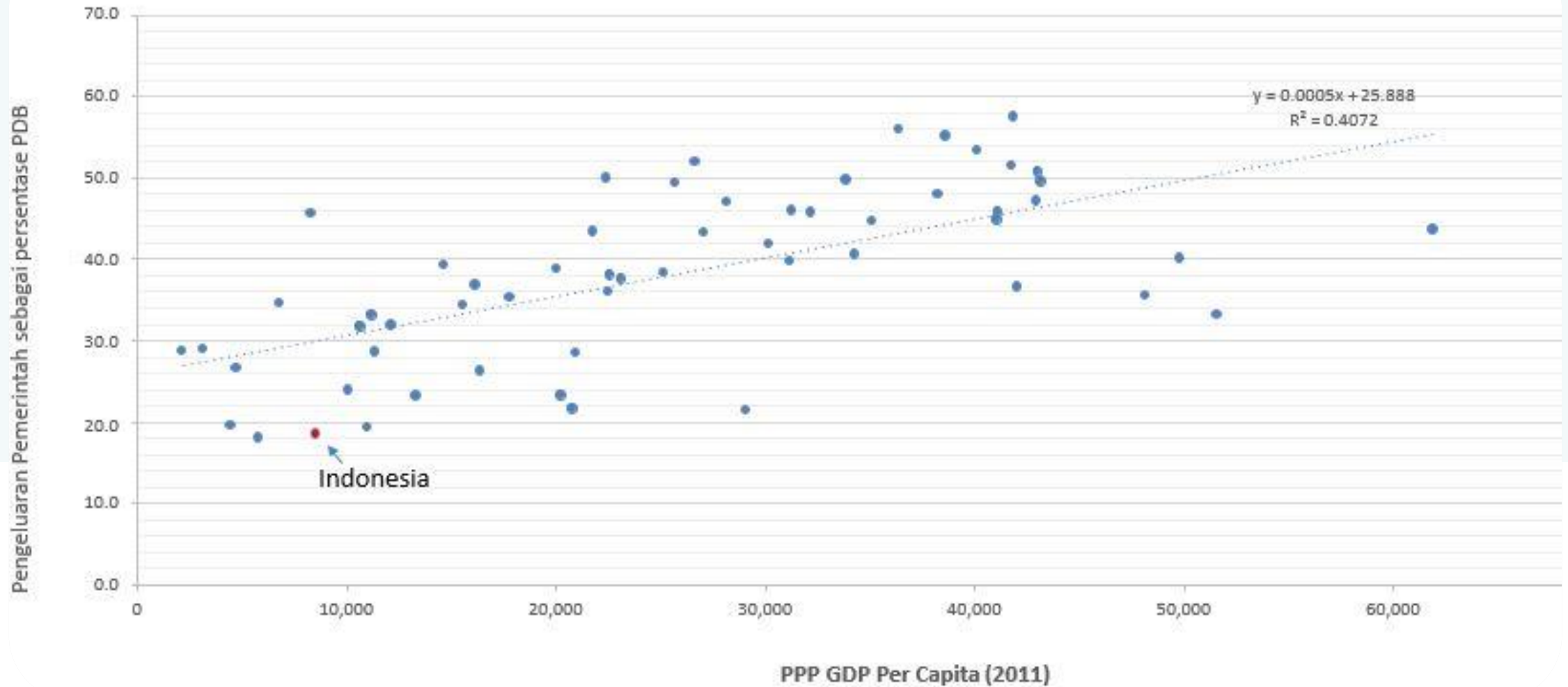


**Ketimpangan (GINI Ratio)**



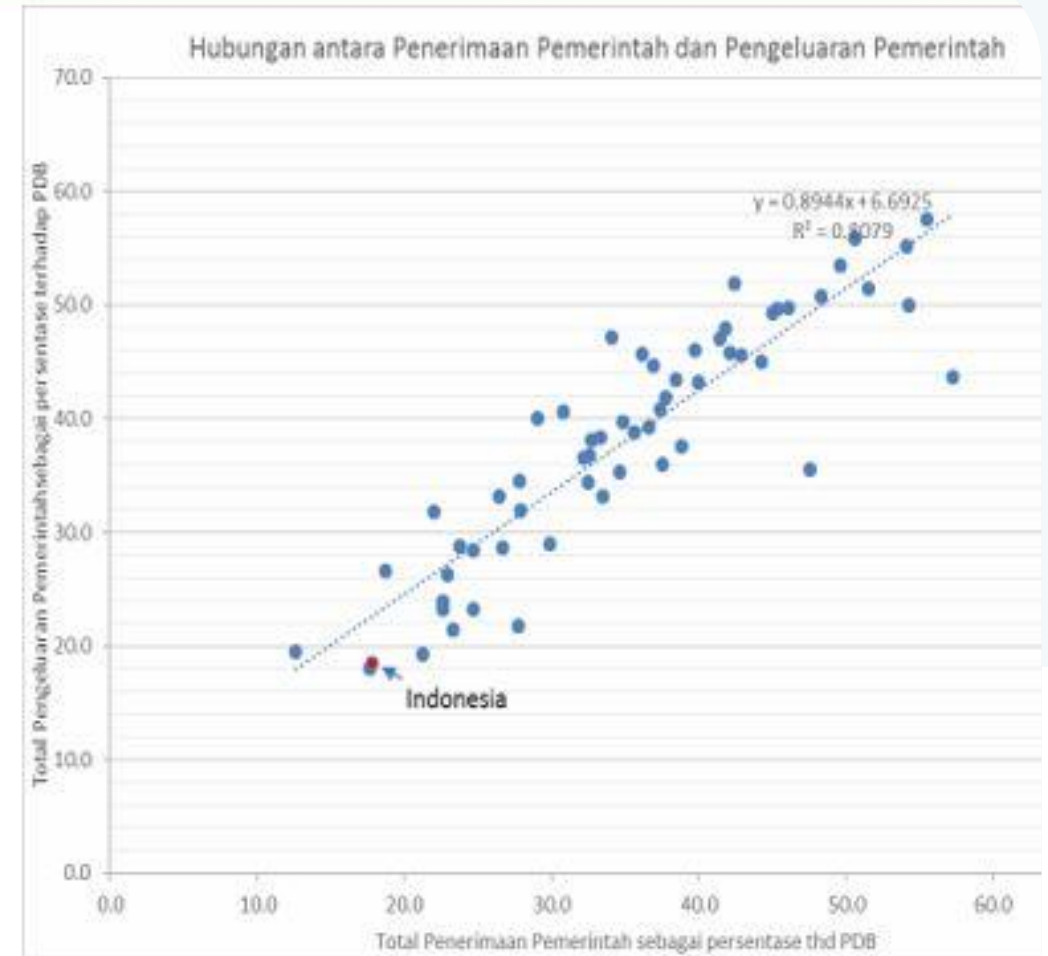
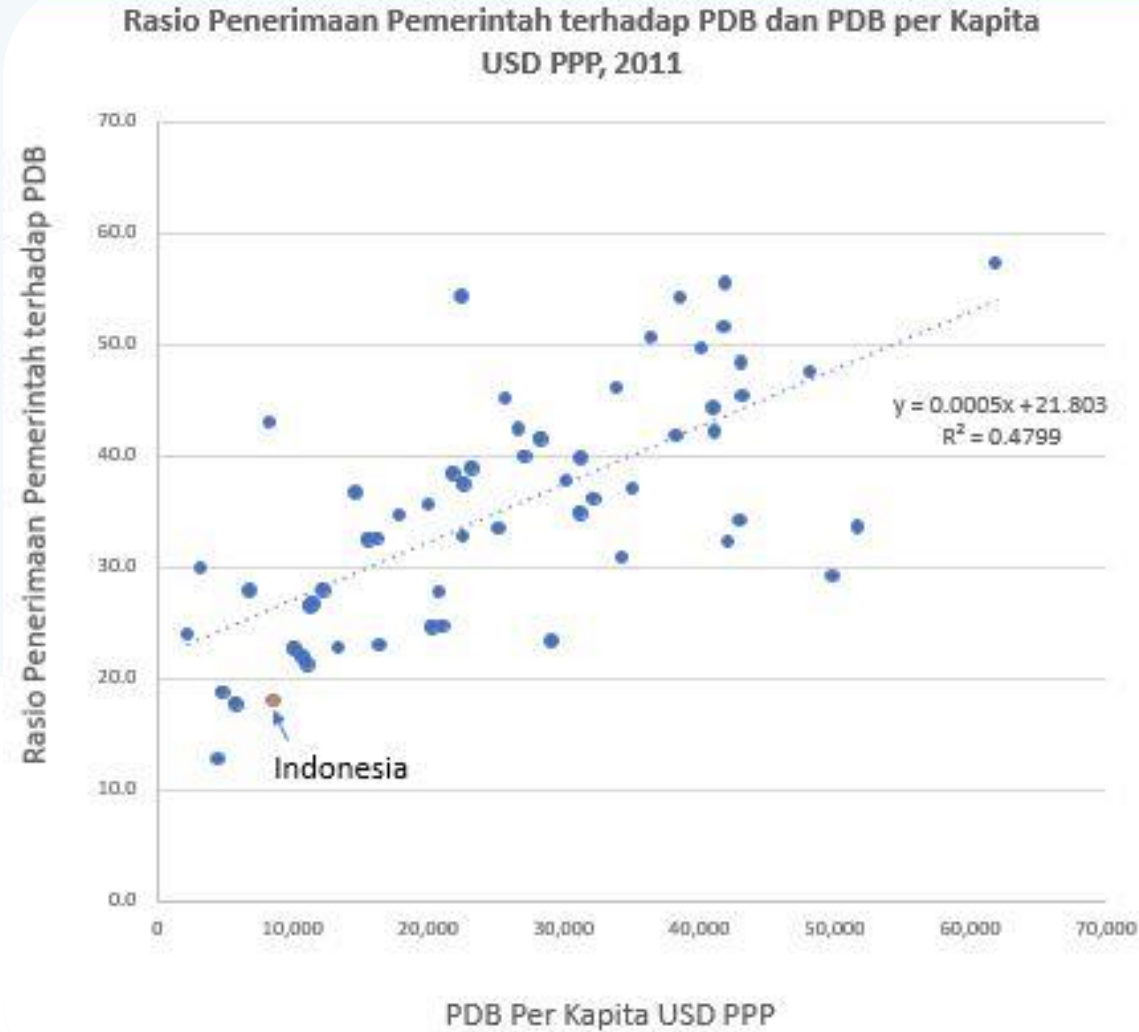
# T e t a p i pengeluaran pemerintah terhadap P D B m a s i h di bawah pola normal

Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah sebagai Persentase terhadap GDP Per Kapita (2011 PPP), 2011



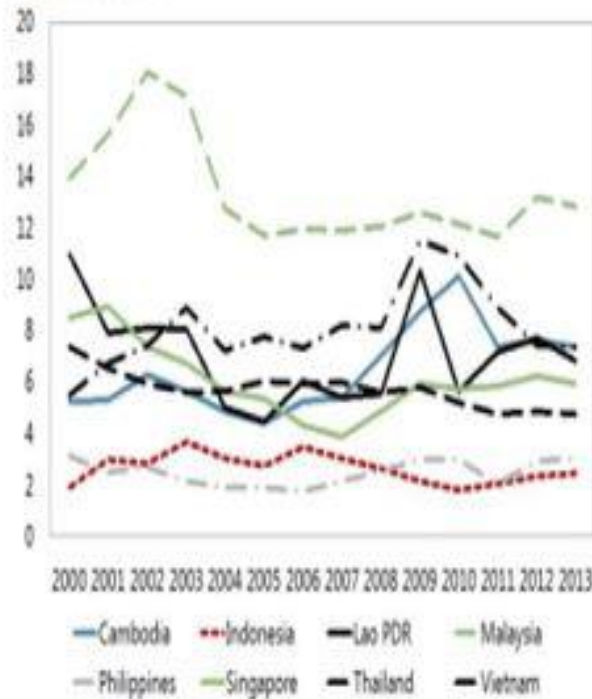


Begitu pula penerimaan pemerintah p e r P D B juga di bawah pola normal



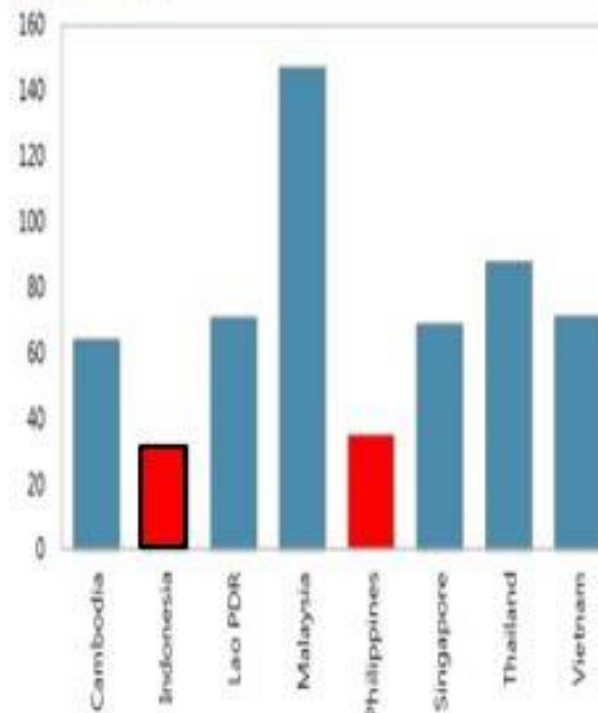
### Public Investment

(In percent of GDP)



### Public Capital Stock, 2013

(In percent of GDP)



Sumber	Nasional	Kota	Desa
<b>Meningkatkan kesenjangan</b>			
Listrik	*	*	1,25
Telepon	1,19	1,54	2,29
Air bersih	1,50	1,26	1,36
SPP-Pendidikan	1,56	1,35	1,36
Bensin	1,91	1,68	2,49
Solar	3,00	2,51	5,90
Transportasi public	*	*	1,28
<b>Netral terhadap perubahan kesenjangan</b>			
Listrik	1,09	0,96	*
Transportasi public	1,10	*	*
<b>Mengurangi kesenjangan</b>			
Minyak tanah	0,20	-0,08	0,77
Transportasi public	*	0,88	*

Sumber: Penghitungan LPEM FEUI, 2003

## 1. Perluasan Basis Pajak

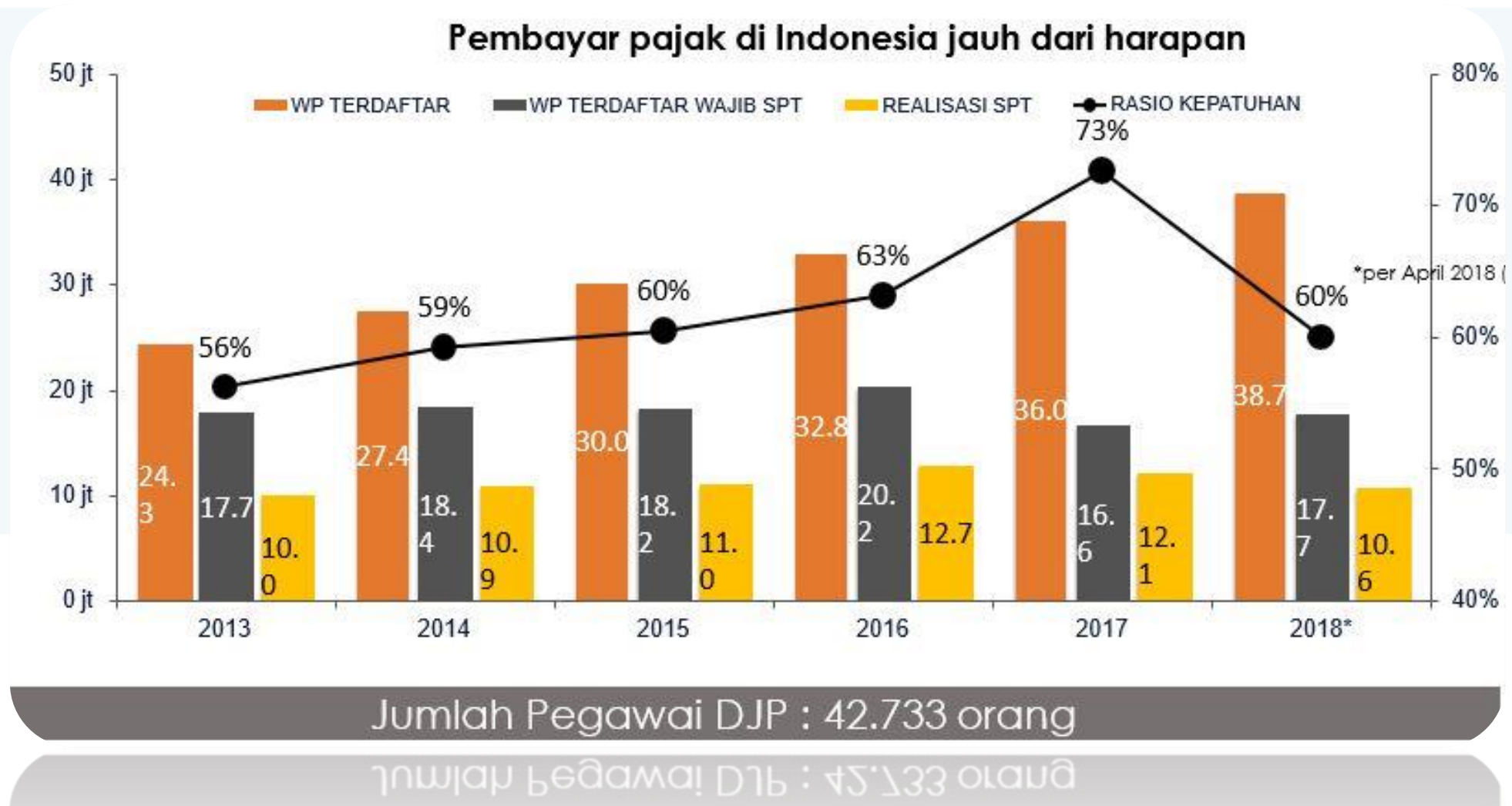
- Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan
- Pelajaran dari Tax Amnesty 2016-2017:
  - kontributor pembayar tax amnesty adalah pembayar pajak yang telah berkontribusi. Artinya pembayar pajak yang tergolong “patuh” pun tidak membayar pajak seperti yang seharusnya.
  - Pembayar pajak baru masih minimal. Masih banyak penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak patuh dan tidak membayar pajak.

## 2. Perbaikan tax administration

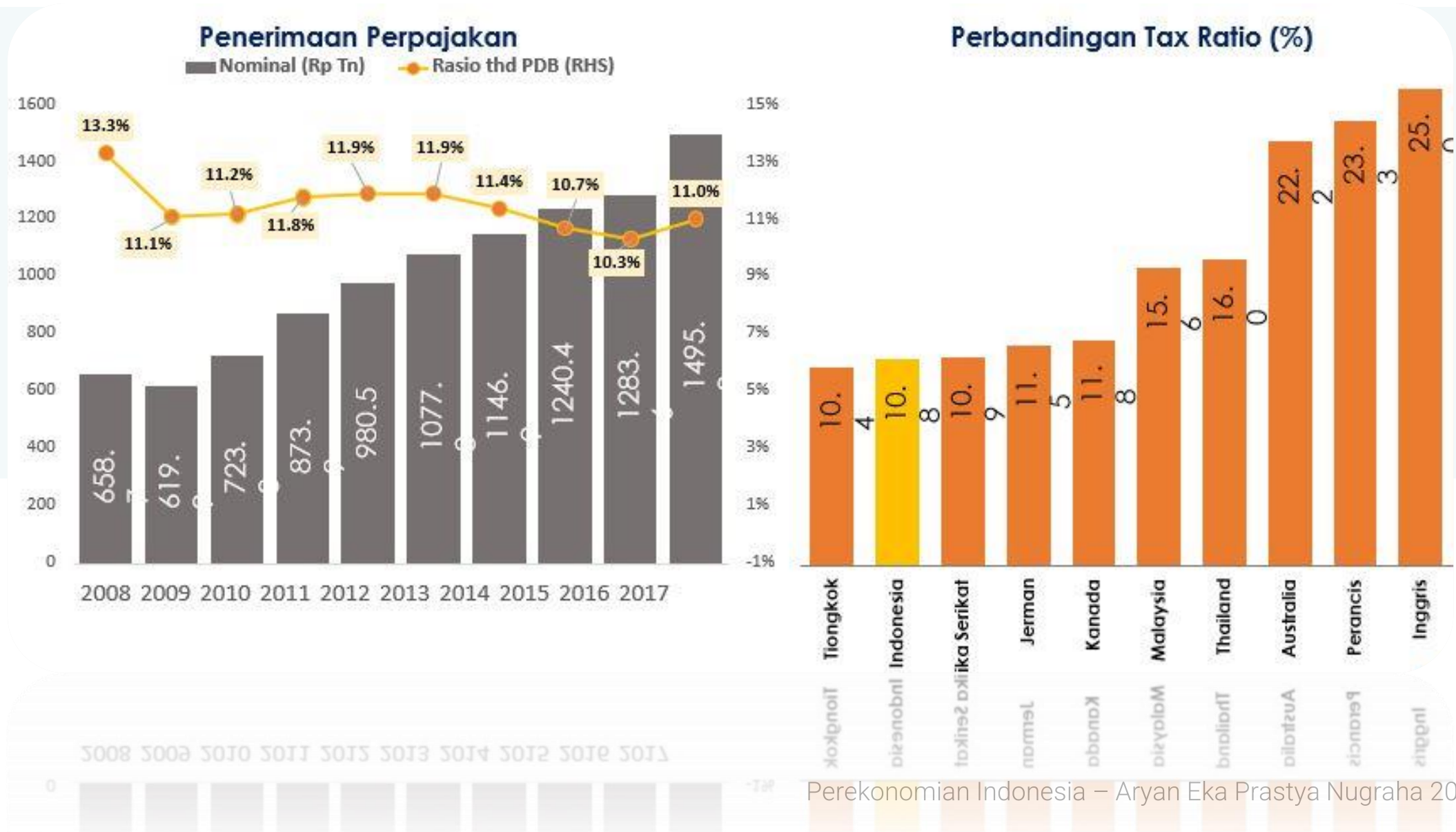
- Sistem IT yang ada jauh dari memadai. Perlu perbaikan secara menyeluruh untuk memperbaiki *tax payer's confidence* dan integritas sistem perpajakan



# Kepatuhan Pajak Masih Rendah Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas



# Berujung Pada Tax Ratio Yang Rendah



# Tujuan reformasi pajak

---

- Peningkatan penerimaan pajak per PDB dengan menutup “compliance gap”.
- Perbaikan iklim investasi dengan mengurangi biaya tax compliance dari wajib pajak.
- Efisiensi Tax Administration dengan meminimalkan biaya pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan
- Membangun public trust and confidence terhadap integritas sistem perpajakan.

# Prinsip-prinsip reformasi pajak

- **Simplicity:** tax system and tax administration should be easy to comply
- **Predictability:** tax law and regulation should be clear, accessible and consistently applied.
- **Effectiveness:** Tax Payer services and enforcement programs should be tailored to the specific characteristic of large, medium and small tax payers.
- **Integrity:** zero tolerance for corruption
- **Performance:** There should be incentives for high performance and accountability for result.
- **Transparency:** Actions taken by tax administration should be subject to scrutiny and results widely publicized
- **Efficiency :** paper-based should be minimized through investment in modern technology.
- **Quality :** problems should be identified and resolved before they become disputes
- **Fairness:** Dispute resolution should be fast, lost cost and imparzial
- **Professionalism :** Tax officer should be competent and highly motivated.





# CASE

investasi pada kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu cara mempercepat kemajuan pada 2018 dan 2019

"digital finance" diharapkan juga dapat membantu usaha menengah dan kecil untuk lebih berkembang.

kebijakan fiskal memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional.





# REFLEKSI

1. Informasi penting hari ini
2. Manfaat penting dari informasi penting hari ini
3. Tindak lanjut yang dapat saudara lakukan



# THANK YOU!

Do you have any questions?

